

**HADIS, GERAKAN & POLITIK KEAGAMAAN:
Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin**

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah¹ dan Siska Sukmawati²

UIN Sunan Kalijaga, Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281, Indonesia^{1,2}

Email : 27najiyahnln3@gmail.com

ABSTRACT.

The involvement of ulama during elections is increasingly not only giving lectures, impressions, and advice, but also providing "direct" positive support to leaders. In today's election issues can be seen increasingly experiencing a shift. For example, in the 2019 presidential elections, KH. Ma'ruf Amin as vice president. There are three formulations of the problem, namely: first, what is the role of the ulama during elections in Indonesia and its correlation with hadith? second, what is the profile and track record of KH. Ma'ruf Amin? third, what is the shape of the shift in the involvement of the clergy in the 2019 presidential elections? This paper uses qualitative research methods based on data sources obtained from books, journals, theses, and media sites related to the same theme. In analyzing the research data, the researcher carried out three activities, namely data condensation, data presentation, and conclusion/verification which took place simultaneously. The results are, first, the role of the Ulama in bringing prosperity to the nation begins to roll in the presidential elections thus encouraging the political elite to "approach" the Ulama to form a "religious" image. Second, before serving as Vice President of the Republic of Indonesia, Ma'ruf Amin was a scholar with the positions of General Chair of the MUI and Executive Board of Nadhatul Ulama (PBNU). Third, the shift in the role of the ulama then went up one level when one of the Indonesian Islamic leaders, namely KH. Ma'ruf Amin was nominated as Joko Widodo's running mate in the 2019 presidential elections. During his candidacy, he also conveyed to santri in Indonesia that ulama can also be leaders.

Keyword: *Role of the ulama; Pemilu-Pilpres; KH. Ma'ruf Amin.*

ABSTRAK.

Keterlibatan para ulama pada saat pemilu kian lama tidak hanya memberikan ceramah, kesan maupun nasihat, namun juga memberikan dukungan positif “langsung” kepada pemimpin. Pada persoalan pemilu masa sekarang bisa dilihat semakin mengalami pergeseran. Sebagai contoh dalam pemilu-pilpres 2019, mengusung ulama KH. Ma'ruf Amin sebagai *cawapres*. Secara khusus, terdapat tiga rumusan masalah, yakni: *pertama*, bagaimana peran para ulama selama pemilu di Indonesia dan korelasinya dengan hadis? *kedua*, bagaimana profil serta rekam jejak KH. Ma'ruf Amin? *ketiga*, bagaimana bentuk pergeseran dari keterlibatan ulama pada pemilu-pilpres 2019? Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan pada sumber-sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi/tesis dan situs-situs media yang berkaitan dengan tema sama. Dalam melakukan analisis atas data penelitian, peneliti melakukan tiga kegiatan yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi yang berlangsung secara bersamaan. Hasilnya, *pertama*, peran Ulama yang mensejahterakan bangsa mulai bergulir dalam pemilu-pilpres sehingga mendorong elite politik untuk “mendekati” para ulama agar dapat membentuk citra “keagamaan”. *Kedua*, sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin adalah seorang ulama dengan jabatan Ketua Umum MUI dan Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU). *Ketiga*, pergeseran peran ulama ini kemudian naik satu tingkat ketika salah satu tokoh Islam Indonesia yakni KH. Ma'ruf Amin dicalonkan sebagai pasangan Joko Widodo dalam pemilu-pilpres 2019 lalu. Selama pencalonan diri, beliau juga pernah menyampaikan kepada para santri di Indonesia bahwa ulama juga dapat menjadi pemimpin.

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023

Kata kunci: Peran Ulama; Pemilu-Pilpres; KH. Ma'ruf Amin.

PENDAHULUAN

Peran ulama sebagai figur mewakili Nabi saw. pada dasarnya adalah sebagai penjelas akan persoalan-persoalan krusial bagi masyarakat Islam yang menyangkut agama, sosial, politik, kesehatan dan sebagainya dengan didasari oleh Al-Qur'an dan Hadis (Amir, 2020). Ulama dalam kehidupan sosial sering dikenal sebagai pejabat keagamaan, para ulama sebagai tokoh urusan agama pada keulamaan Islam yang sering menjadi panutan oleh masyarakat. Karena dalam kehidupan bermasyarakat ulama dipandang sebagai orang yang suci dan mampu membimbing spiritualitas umat menuju pencerahan jiwa dan pengampunan Tuhan (Nasir, 2015, hal. 26–49).

Selain menjadi tokoh agama di masyarakat luas, ulama sebagai tokoh yang kharismatik begitu kuat dan mampu menjadi *opinion leader* di tengah masyarakat. Perkataan seorang ulama terkadang mampu melebihi kekuatan suara seorang pemimpin negara. Ulama dijadikan sebagai simbol daripada etika dan moralitas politik. Maka dari itu keterlibatan ulama dalam ranah politik harus bisa memberikan sumbangsih yang besar untuk terciptanya bangunan struktur politik yang bermoral (Yusalia, 2011). Namun, pada persoalan pemilu masa sekarang dapat dilihat semakin mengalami pergeseran. Fenomena ini semakin terlihat dalam pemilu-pilpres 2019 yang mengusung ulama KH. Ma'ruf Amin sebagai cawapres dengan Joko Widodo sebagai capres. Tidak sedikit yang menilai bahwa pencalonan KH. Ma'ruf Amin ini menjadi alasan kuat pasangan Jokowi-Ma'ruf terpilih sebagai presiden dan wakil presiden RI 2019-2024 pada pemilu-pilpres 2019 lalu (Sonny, 2019b, hal. 453–454).

Terkait tema pembahasan serupa, kajian-kajian yang telah ada sebelumnya memuat seputar sejarah dan politik kekuasaan di Indonesia (Azharghany, Adim, & Rusdi, 2022; Barata & Simanjuntak, 2019; Khoiruddin, 2018; Kurniawan, 2018; Putra, 2016; Qurtuby, 2018; Umar, 2020) terkhusus bahasan pemilu (Huda & Dayat, 2019; Istianaha & Saehudin, 2023; Mahadi, 2015; Ronaldo & Darmaiza, 2021; Zuhendra, 2022) baik dari kalangan partai Islam pra pemilu (Sahputra & Ankesa, 2022) maupun peran tokoh agama (ulama) (Bolong, 2018; Rahmawanto, 2016; Setiawan, 2014) dan ormas-ormas Islam (NU dan Muhammadiyah) pasca pemilu (Budiman & Setyahadi, 2019).

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023

Dari beberapa kajian literatur tersebut, maka tulisan ini akan melengkapi beberapa ruang kosong dalam kajian-kajian di atas, yaitu dengan menelaah pergeseran peran ulama dalam pemilu-pilpres 2019 dan realisasinya atas hadis-hadis yang terkait dengan menganalisis salah satu tokoh sentral di Indonesia yakni KH. Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, secara khusus, tulisan ini berfokus pada 3 pertanyaan sekaligus menjadi tujuan dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana peran para ulama selama pemilu di Indonesia serta korelasinya dengan hadis; Kedua, bagaimana profil serta rekam jejak KH. Ma'ruf Amin; Ketiga, bagaimana bentuk pergeseran (*change*) dari keterlibatan ulama pada pemilu-pilpres 2019 lalu.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan pada sumber-sumber data yang diperoleh dari buku, jurnal, skripsi/tesis dan situs-situs media yang berkaitan dengan tema sama. Dalam melakukan analisis atas data penelitian, peneliti melakukan tiga kegiatan yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) yang berlangsung secara bersamaan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014, hal. 31–33), dengan tujuan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini.

HASIL DAN DISKUSI

Hadis dan Peranan Ulama selama Pemilu di Indonesia

Dalam dunia politik, keterlibatan para ulama pada saat pemilu semakin lama semakin terlihat. Tidak hanya memberikan ceramah, kesan maupun nasihat, ulama juga memberikan kontribusi berupa dukungan positif kepada pemimpin, disamping juga menjadi kekuatan *check* dan *balance* dalam perannya sebagai mitra penguasa (Yusalia, 2011, hal. 21–22).

Tingkat pemahaman konseptual dan tataran praktis masih memiliki problematika antara hubungan *ad-din* (agama) dengan *siyasah* (politik) (Putra, 2016, hal. 69). Terkait hal tersebut, keberadaan ulama menjadi sorotan di antara hubungan keduanya disebabkan karena ulama merupakan tokoh sentral dan memiliki kontribusi di dalamnya. Selain menjadi penggerak umat untuk taat beragama (Islam), ulama juga berperan aktif di dunia politik terutama di Indonesia. Pada era reformasi demokrasi

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023

yang telah disuarakan dan diperjuangkan telah memberikan peluang dan kesempatan bagi ulama untuk aktif dalam panggung politik. Ulama memiliki peluang untuk menduduki jabatan politis, dan bahkan menjadi anggota dewan (Mahadi, 2015, hal. 231).

Jika melihat kembali fungsi dan peranan seorang ulama sekurang-kurangnya dapat terbagi menjadi dua bagian, yakni *pertama*, memberikan ilmu dan pengetahuan kepada masyarakat terkhusus pada ilmu-ilmu agama, termasuk di dalamnya pengahayatan dan pengalamannya agar masyarakat memiliki pegangan dalam hidup. Tugas ini adalah amanat yang terutama sekali dipikul oleh seorang ulama dan tentu, dilaksanakan dalam kondisi dan situasi apapun, serta tidak untuk diabaikan begitu saja. Ini disandarkan pada hadis riwayat Thabrani: “*Hendaklah kamu saling nasehat-menasehati dalam perkara (mengembangkan) ilmu, sebab seorang yang berkhianat terhadap ilmu itu lebih dahsyat (akibatnya) daripada berkhianat terhadap harta benda. Allah swt akan meminta pertanggungjawaban kamu dalam hal itu*”. Dalam riwayat lain juga dikatakan: “*Manusia paling dahsyat menerima azab (siksa) kelak pada hari kiamat ialah seorang ulama yang tidak memanfaatkan ilmunya*” (HR. Thabrani dan Baihaqi).

Kedua, bertugas melakukan perbuatan *amar ma'ruf nahi munkar*. Meski dalam Islam perbuatan ini adalah wajib bagi setiap muslim, namun kedudukan para ulama yang ilmu agamanya lebih luas menjadikan tugas tersebut agak khusus dipikul di setiap pundak masing-masing ulama (Nasution, 1988, hal. 182–185). Kedua peranan ulama ini selaras dengan kualitas ulama yang diungkapkan dalam riwayat ad-Dailami: “*Ulama itu ada tiga macam. Pertama, ia hidup dengan ilmunya dan orang lain pun hidup dengan ilmunya itu. Kedua, orang lain hidup dengan ilmunya sedang dia (ulama) itu menghancurkan dirinya sendiri. Ketiga, dia hidup dengan ilmunya, sedang orang lain tidak bisa hidup (memetik manfaat) dari ilmunya itu*”. Berdasarkan riwayat tersebut, maka masyarakat membutuhkan kategori ulama yang pertama, yakni baik ulama maupun orang lain sama-sama merasakan manfaat dari ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ulama.

Ulama memiliki peranan tersendiri sebagai figur yang dihormati dan dihargai, dimintakan nasihat-nasihat serta dijalankan fatwa-fatwanya. Sehingga, ulama menjadi

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023

sosok yang berwibawa, memiliki pengaruh (yang signifikan) dan berintegritas (Nasution, 1988, hal. 188–189).

Keterlibatan ulama dalam ranah politik bukanlah suatu fenomena baru. Sejak lama, peran ulama dalam politik begitu besar. Jika dilihat dengan kaca mata empiris, keterlibatan ulama dalam politik telah dicontohkan oleh Rasulullah. Berdasarkan contoh tersebut menjadikan motivasi ulama untuk berpolitik, baik pra kemerdekaan, orde lama, orde baru, maupun pada masa reformasi, walaupun kualitas dan kuantitas setiap periodenya berbeda-beda. Ulama sangat berperan dalam pewarnaan politik, terutama politik di Indonesia.

Selain mendapat motivasi dari contoh empiris, terdapat faktor lain yang mempengaruhi ulama terlibat dalam politik. *Pertama* faktor teologis, ulama adalah seorang figur yang lekat dikenal sebagai orang yang menguasai keilmuan Islam yang bercorak sunni, dengan prespektif ini hubungan antara agama dan politik dalam tradisi sunni pada dasarnya tidak bisa dipisahkan. Politik dan agama dianggap bagian integral dari agama, dan tidak perlu dijauhi. *Kedua* faktor dakwah, dengan bergabung dan berperan dalam politik merupakan media yang digunakan oleh ulama untuk mensosialisasikan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan usaha untuk menyebarkan nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam melalui jalur politik. Banyak asumsi yang muncul bahwa dengan melalui jalur politik, maka medan dakwah akan semakin menyebar dan meluas serta berjalan secara efektif. *Ketiga* faktor solidaritas politik, dari kedua faktor sebelumnya, faktor ini yang sulit untuk dihindari sehingga menjadikan ulama harus terjun ke dalam politik (Setiawan, 2014, hal. 8).

Memiliki peran sentral dalam masyarakat, ulama juga memicu adanya tuntutan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Ulama juga memiliki peran penting dalam mengendalikan ketegangan sosial dan merupakan figur yang bisa menyatukan masyarakat (Fadhil, 2022, hal. 1). Pola keberadaan seorang ulama sangat bervariasi dan beragam dan mengalami pergeseran-pergeseran, serta perubahan-perubahan dari tradisional ke rasional (Khoiruddin, 2018, hal. 134). Kegiatan pemilu atau yang sering disebut sebagai pesta demokrasi sering membawa sosok ulama untuk ikut andil di dalamnya dan mewarnai berlangsungnya acara tersebut.

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023

Pada pemilu-pilpres 2014, sebagai contoh, dapat dilihat peran Ulama yang seyogyanya mempersatukan dan mensejahterakan bangsa justru memperlihatkan isu-isu keagamaan dalam ranah perpolitikan dan menjadi pusatnya perhatian publik. Rekam jejak keagamaan serta visi-misi mereka berdasarkan ajaran-ajaran Islam menjadi kriteria pemimpin yang seolah menjadi indikator mutlak yang harus dimiliki. Hal ini kemudian mendorong para elite politik untuk menggunakan strategi pendekatan kepada para ulama maupun ormas Islam agar dapat membentuk citra “keagamaan”. Dari sinilah kemudian melahirkan perspektif bahwa Ulama yang memperjuangkan ajaran Islam adalah sosok tonggak utama dalam bernegara (Amir, 2020, hal. 18–19).

Persoalan terkait kriteria-kriteria menjadi seorang pemimpin pernah disampaikan lewat kajian berbasis media *online*, tepatnya pada tahun 2017 oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah. Pada kanal Youtube “Lentera Islam”, Ustadz Khalid mengatakan bahwa pemimpin RI haruslah seorang muslim. Hal ini karena mayoritas negara Indonesia adalah beragama Islam. Oleh sebab itu, kriteria pemimpin ideal adalah yang berasal dari kalangan ulama. Hal ini kemudian disandarkan kepada HR. Abu Dawud No. 4607 (Lentera Islam, 2017). Adapun redaksi lengkapnya adalah sebagai berikut:

سنن أبي داود (211/ 12) - 3991(4607) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو السُّلَمِيُّ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالَا أَتَيْنَا الْعُرْبَانَ بْنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِمَّنْ نَزَلَ فِيهِ {وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ} فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَانِدِينَ وَمُقْتَسِبِينَ فَقَالَ الْعُرْبَانُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً دَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مَوْدِعٌ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ أَوْصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبِيبًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشَ مِنْكُمْ بِعَدِي فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمُهَدِّبِينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ وَإِنَّاكُمْ وَمُحَدَّثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ

“..... Maka, hendaklah kalian berpegang teguhlah pada sunnahku, sunnah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham...” (Dāwud, 2018)

Selain riwayat Abu Dawud di atas, hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmidzi No. 2676 (Lihat: Tirmidzi, 2018) dan Ibn Majah No. 42 dengan tambahan beberapa periwayat (Lihat: Majah, 2018).

Jika kembali kepada konteks video kajian Ustadz Khalid Basalamah, redaksi hadis yang digarisbawahi sebagaimana disebutkan di atas adalah potongan hadis yang

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023

disampaikan Ustadz Khalid dalam menjelaskan idealnya pemimpin yang berasal dari kalangan ulama. Tentunya, penjelasan tersebut disertai dengan syarah matan sekaligus interpretasi beliau dalam mengontekstualisasikan hadis tersebut pada sistem kepemimpinan RI saat ini. Meski begitu, Ustadz Khalid tidak tampak secara eksplisit menyebutkan siapa ulama yang pantas untuk menjadi pemimpin. Beliau hanya menyampaikan kriteria-kriteria yang ideal sebagai seorang pemimpin negara, khususnya NKRI.

Profil dan Rekam Jejak Ulama KH. Ma'ruf Amin

Salah satu ulama yang tergolong masyhur di Indonesia adalah KH. Ma'ruf Amin yang terpilih sebagai Wakil Presiden RI periode 2019-2024 pada pemilu-pilpres 2019 lalu. Sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden, ulama yang bernama lengkap Prof. DR. Kyai Haji Ma'ruf Amin ini adalah Ketua Umum MUI dan Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU). Beliau lahir di Tangerang pada tanggal 1 Agustus 1943 dan menikah pada tahun 1963 dengan Siti Huriyah (ada yang menyebutkan menikah pada tahun 1964 ketika Ma'ruf Amin berusia 21 tahun dan Huriyah berusia 18 tahun (Ulum, 2018, hal. 19)) yang berasal dari kalangan ulama pula (Mujab & Irfansyah, 2020, hal. 59). KH. Ma'ruf Amin dan Siti Huriyah kemudian dikaruniai delapan orang anak, enam di antaranya berjenis kelamin perempuan yang diberi nama depan 'Siti', sementara dua lainnya berjenis kelamin laki-laki dengan nama depan yang sama yakni 'Ahmad'. Setelah Siti Huriyah wafat pada tahun 2013 karena sakit yang dideritanya meski sempat memperoleh perawatan, KH. Ma'ruf Amin memutuskan untuk menikahi Wury Estu Handayani setahun setelahnya (tepatnya selama kurang lebih tujuh bulan), yakni pada 31 Mei 2014 (Ulum, 2018, hal. 21–23).

KH. Ma'ruf Amin adalah cicit dari salah satu ulama besar Nusantara, yakni Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, sosok ulama besar yang berasal dari Banten dan pernah menjabat sebagai Imam Masjidil Haram. Selain itu, ia juga disebut sebagai Bapak Kitab Kuning Indonesia oleh Para ulama dan telah menulis ratusan kitab atau buku selama hidupnya. Kitab-kitab yang dihasilkan oleh beliau banyak dijadikan sebagai rujukan sumber penelitian di Mesir dan Libya (Ulum, 2018, hal. 17).

Sejak kecil KH. Ma'ruf Amin menghabiskan waktu di Desa Kresek, Tangerang, dimulai dengan bersekolah dasar pada pagi harinya dan mengaji di Madrasah Ibtidaiyah (MI) pada sore harinya. Beliau sempat menjadi santri di

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023

Pesantren milik KH. Syam'um Alwiah, Citangkil, Cilegon, Banten untuk belajar agama. Kemudian, beliau menjadi santri di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur pada usia 12 Tahun dan menempuh pendidikan dari dasar. Setelah lulus, KH. Ma'ruf Amin melanjutkan studi di SMA Muhammadiyah. Namun, tidak sampai menyelesaikan pendidikannya, beliau kembali ke Banten untuk memperdalam ilmu agama di berbagai pondok di antaranya yakni pondok Pesantren Pelamunan Serang-Banten; Pesantren Petir, Serang; dan Pesantren Caringin, Labuan.

Setelah menikah dengan istri pertamanya, KH. Ma'ruf Amin pindah dan menempuh pendidikan di Fakultas Ushuluddin Universitas Ibn Khaldun, Bogor, Jakarta Utara. Selama itu, beliau aktif berorganisasi hingga pada tahun 1989, KH. Ma'ruf Amin dipilih sebagai Khatib Aam Syuriah PBNU pasca Mukhtamar NU di Pesantren Krapyak. Meski begitu, KH. Ma'ruf Amin menghabiskan waktu lebih banyak untuk memberi fatwa seputar ekonomi syariah di MUI pada tingkat nasional. Karena keahlian KH. Ma'ruf Amin dalam bidang ekonomi syariah, beliau memperoleh salah satu capaian terbesar di bidang tersebut yakni sebagai pencetus Dewan Syariah Nasional (DSN) yang dibentuk pada tahun 1999 langsung di bawah naungan MUI dan selanjutnya terpilih sebagai Ketua DSN MUI. Selama jabatan tersebut, KH. Ma'ruf Amin telah mengeluarkan total fatwa sebanyak 116 seputar aktivitas ekonomi yang menjadi pegangan umat Islam.

Maka, tidaklah mengherankan jika dikatakan bahwa KH. Ma'ruf Amin adalah ulama dengan tradisi keilmuan klasik yang sangat mumpuni. Ia juga adalah bentuk representasi dari semangat etos generasi seorang santri salaf yang menyibukkan diri dengan mengaji ilmu-ilmu keislaman yang termaktub dalam kitab kuning. Tidak hanya mengaji dan mendiskusikannya, Ma'ruf amin juga mengaktualisasikan sekaligus mengamalkannya untuk membangun bangsa dan negara yang lebih baik (Ulum, 2018, hal. 38–39).

Meski KH. Ma'ruf Amin tidak menempuh pendidikan hingga magister maupun doktor, banyaknya pengalaman beliau dalam bidang agama dan politik menjadikan KH. Ma'ruf Amin sebagai *Rais 'Aam* PBNU periode 2015-2020. Di samping itu, beliau juga dipilih sebagai Ketua MUI Pusat pada periode 2015-2019. KH. Ma'ruf Amin juga aktif berkarya di bidang akademis sehingga mendapat gelar Doktor *Honoris Causa* (Dr. HC) yang diperoleh dari Universitas Islam Negeri Syarif

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023

Hidayatullah Jakarat serta gelar profesor di bidang hukum Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang. Pada tanggal 16 Mei 2017, KH. Ma'ruf Amin dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 69195/A2.3/KP/2017 pada 16 Mei 2017 (Mujab & Irfansyah, 2020, hal. 59–60). Informasi lain mengatakan beliau dikukuhkan sebagai Guru Besar pada tanggal 24 Mei di tahun yang sama dengan dihadiri oleh Joko Widodo, Khofifah Indah Parawansa, Muhammad Natsir dan Said Aqil Siroj, dan pejabat tinggi lainnya (Ulum, 2018, hal. 37–38).

Dari sini, maka dipahami bahwa gelar akademik yang dimiliki para ulama/kiyai tidak hanya dapat diperoleh dari jenjang perkuliahan normal saja, tetapi juga dapat diperoleh dari hasil belajar dari pesantren ke pesantren. Para ulama yang mendapatkan gelar ini sudah barang tentu karena keahlian mereka yang mumpuni dan memiliki kiprah besar untuk bangsa dan Negara. Sebut saja beberapa di antara para ulama/kiyai yang mendapat gelar akademik selain KH. Ma'ruf Amin adalah KH. Ali Yafi, KH. R. Moh Adnan, KH. Saifuddin Zuhri, dan KH. Anwar Musaddad (Ulum, 2018, hal. 39).

Pada usianya yang ke-75 tahun, tepatnya pada Kamis 9 Agustus 2019 bertempat di Restoran Plataran, Jakarta, KH. Ma'ruf Amin ditunjuk sebagai calon wakil presiden RI dan mendampingi calon presiden Joko Widodo pada pemilu-pilpres 2019 lalu (Mujab & Irfansyah, 2020, hal. 60).

Analisis Pergeseran Keterlibatan Ulama dalam Pemilu-Pilpres 2019

a. Pergeseran Peran Ulama dan Realisasi HR. Abu Dawud No. 4607

Berbicara mengenai kegiatan politik seperti acara pemilu sering sekali melibatkan simbol-simbol keagamaan, seperti kemusliman dan keulamaan. Keberadaan ulama menjadi sorotan baik dari kalangan politikus sendiri maupun dari kalangan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pengetahuan terhadap tingkat popularitas ulama sangat tinggi. Tingkat keteladanan masyarakat terhadap ulama cukup tinggi, masyarakat akan spontan mematuhi saran serta nasehat ulama atau tokoh agama dalam konteks umum yakni dari kepribadian dan perilakunya (Fuadi, Adnan, & Utomo, 2014, hal. 8–9). Ulama yang dipahami sebagai menjaga stabilitas

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023

sosial, moral, dan etika ternyata juga berpengaruh dalam menertibkan pilihan dalam politik pemilu (Huda & Dayat, 2019).

Keadaan saat ini politik Islam yang diusung para ulama masih diperhitungkan dan dianggap sebagai sebuah strategi untuk mengawal demokrasi dan mewujudkan peradaban manusia. Namun tidak menutup kemungkinan keadaan politik Islam akan terus menyusut disebabkan peran ulama hanya dijadikan sebagai pendulang saja, tanpa mempertahankan nilai-nilai yang telah lama menjadi pedoman para ulama terdahulu dalam hubungan agama dengan negara (Azharghany et al., 2022, hal. 5–6).

Terkait kegiatan ulama yang berbaur dengan politik tersebut disebabkan karena ulama mencerminkan kompleksitas pandangan, contohnya ulama ulama memiliki potensi lokal yang bisa memberikan kontribusi atau warna berbeda dalam politik, ulama juga memiliki kemampuan menciptakan keadaan politik yang kondusif. Selain itu keberadaan ulama juga dapat mewujudkan partisipasi masyarakat dalam politik. Sosok ulama yang berpotensi dan memiliki status sosial disegani masyarakat, serta memiliki banyak jaringan sering kali didatangi atau dikunjungi para politikus untuk mendapatkan dukungan lebih banyak. Pasca para ulama atau petinggi agama dikunjungi, ulama juga kerap kali diundang dalam acara-acara partai dan kampanye (Istianaha & Saehudin, 2023, hal. 242). Berdasarkan potensi yang dimiliki, hal tersebut menyebabkan pergeseran paradigma dakwah seorang ulama atau tokoh agama.

Keterlibatan para ulama dalam pemilu-pilpres belakangan perlahan mengalami pergeseran tujuan dari sebelumnya yang adalah berkontribusi pada penyampaian nasihat atau ceramah selama pemilu-pilpres berlangsung condong mendukung kepada satu kandidat, disamping pemberian dukungan positif pada calon pemimpin dan menjadi mitra penguasa—seperti yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya—. Bentuk pergeseran tujuan tersebut adalah ketika ulama ikut bagian dalam pemilihan umum seperti yang ditunjukkan oleh salah satu tokoh Islam Indonesia yakni KH. Ma'ruf Amin dengan menjadi pasangan capres Joko Widodo dalam pemilu-pilpres 2019 lalu.

Terpilihnya kandidat Jokowi-Ma'ruf pada pemilu-pilpres 2019 tersebut secara tidak langsung menjadi wujud terealisasinya HR. Abu Dawud no. 4607 yang disampaikan dalam kajian Ustadz Dr. Khalid Basalamah, sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya. Meski dalam kajian tersebut Ustadz Khalid

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023

Basalamah menyampaikan beberapa kriteria kepemimpinan di Indonesia tersebut terkesan subjektif, namun bukan tidak mungkin hal tersebut terjadi dalam memilih kandidat pemimpin, termasuk pada pemilu-pilpres. Selaras dengan itu, adanya pernyataan KH. Ma'ruf Amin selama mencalonkan diri menjadi cawapres pada pemilu-pilpres 2019 berlangsung, bahwa ulama juga dapat menjadi pemimpin. Pernyataan ini disampaikan beliau kepada para santri di Indonesia ketika diwawancarai oleh media saat melakukan kunjungan ke rumah salah satu ulama' Indonesia untuk meminta restu dan nasihat darinya (JURNAL PAGI, 2018).

b. Signifikansi Peran KH. Ma'ruf Amin Pra-Pasca Jabatan Wapres 2019-2024

Penujukkan KH. Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden RI sama sekali tidak terprediksi. Hal ini karena masyarakat mengira bahwa Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) lebih memungkinkan untuk masuk dalam sorotan Joko Widodo. Selain itu, nama Mahfudz MD (mantan Ketua Mahkamah Agung) juga disebut-sebut sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Joko Widodo dalam pemilu-pilpres 2019. Pada masa pencalonan tersebut, KH. Ma'ruf Amin dianggap memiliki andil dalam menyelamatkan posisi Joko Widodo, meski tidak terlalu sering terlihat di ruang publik. Bahkan, sepanjang aksi 411 dan 212 yang ramai terjadi pada saat itu, diketahui beberapa kali Joko Widodo meminta pandangan Ma'ruf Amin yang masih menjabat sebagai Ketua Umum MUI (Sonny, 2019a, hal. 541–542).

Jika melihat kembali rekam jejak Ma'ruf Amin sebelum mencalonkan dan menjabat sebagai wakil presiden RI hingga sekarang, Ma'ruf Amin dapat dikatakan memiliki nama besar sebagai seorang ulama yang bijaksana dan berpengaruh di Indonesia. Tidak hanya menjabat sebagai Rais Aam PBNU dan ketua MUI, ia juga memiliki jabatan sebagai Dewan Pengarah BPIP. Pada bidang politik, Ma'ruf Amin telah dikenal sebagai ulama yang berpengalaman panjang dalam bidang legislatif yakni sebagai anggota MPR dan DPR RI, DPRD dan Wantimpres. Beberapa fakta ini besar kemungkinan mempengaruhi keputusan Joko Widodo memilihnya sebagai pasangan dalam pemilu-pilpres 2019 dalam membantu membangun Indonesia ke depan serta saling melengkapi ssatu sama lain sebagai “Nasionalis Religius” agar Indonesia menjadi lebih baik.

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023

Sebelum terpilih sebagai kandidat pasangan capres Joko Widodo dalam pemilu-pilpres 2019, Ma'ruf Amin mengaku tidak pernah memperbincangkan persoalan menjadi calon wakil presiden (Cawapres) dan berpasangan dengan Joko Widodo. Bahkan, selama kunjungannya, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin hanya berdiskusi terkait kiat menjaga keutuhan bangsa. Selain itu, Ma'ruf Amin juga mengakui bahwa ia lebih nyaman dengan jabatannya yang kala itu masih sebagai Rais Aam PBNU dan Ketua MUI dibandingkan dengan mencalonkan diri sebagai Cawapres 2019. Ia baru menerima tawaran tersebut saat Menteri Sekretaris Negara Pratikno menghubunginya di detik-detik terakhir dan setelah melakukan perundingan serta mendapat dorongan dari berbagai kalangan khususnya para ulama dan tokoh-tokoh agama Indonesia. Pemilihan Ma'ruf Amin sebagai cawapres juga merupakan bagaian dari upaya menghindari konflik-konflik atau keributan yang terjadi antar umat beragama maupun Islam, sehingga diharapkan ketika menerima tawaran tersebut, Ma'ruf Amin bersama dengan Joko Widodo dapat membangun Indonesia yang hebat di masa depan (Rasyid, Putra, & Arkin, 2023, hal. 115–116).

Pencalonan KH. Ma'ruf Amin sebagai cawapres sekaligus menjadi bantahan/mematahkan isu-isu anti-Islam yang tengah ramai selama masa pemilu-pilpres 2019, bahwa pasangannya yakni Joko Widodo sebagai capres bukanlah seorang anti-ulama/santri (Sonny, 2019a, hal. 545). Dalam mencalonkan diri sebagai cawapres, KH. Ma'ruf Amin memiliki strategi sebagai upaya yang dilakukan selama pemilu berlangsung. Dengan latar balakang sebagai tokoh agama, beliau memberikan kesan yang baik sebagai sosok pemimpin yang disukai banyak orang. Dimulai dengan memberi motivasi, ucapan hingga apresiasi pada pihak lawan.

Ada beberapa strategi yang dilakukan Ma'ruf Amin ketika menjabat sebagai Wakil Presiden RI yang dikenal dengan strategi *impression management*. Strategi paling signifikan yang dilakukan adalah *self-promotion* dan *exemplification*. Dalam *self-promotion*, beliau menjadikan media sosial sebagai sarana untuk menunjukkan prestasi dan kinerja yang selama ini telah dilakukan. Sementara dalam *exemplification*, beliau memperlihatkan sikap moral teladannya dan fokus dalam mengatasi masalah rakyat. Selain dua strategi tersebut, strategi lainnya turut dilakukan yakni *intimidation* yang mana memperlihatkan sub indikator mengancam pihak lawan serta menunjukkan *deadline* dalam bekerja. Strategi ini digunakannya jika berdasarkan pada tujuan

Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023

atribusinya dan tak segan memberikan *deadline kerja* jika menyangkut penyelesaian tanggung jawab kerja. Namun, jika menyangkut indikator mengancam pihak lawan, Ma'ruf Amin dapat dikatakan sangat jarang sekali menunjukkan perasaan marah maupun kecewa di depan publik.

KH. Ma'ruf Amin juga menggunakan strategi *supplication*, yakni mendapat simpati dari masyarakat. Strategi ini paling sedikit dilakukan oleh Ma'ruf Amin yang dibuktikan dengan tidak terlihatnya kesalahan perbuatan yang dimiliki beliau di media sosial instagramnya. Sebaliknya, beliau secara halus menunjukkan kelemahan dirinya dengan menekankan ketidakmampuan Ma'ruf Amin untuk mengerjakan urusan dan tugas-tuganya sendiri sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial (Nugroho, Priyowidodo, & Luik, 2020, hal. 9–10), sehingga hal ini menjadi kesan bahwa membangun pemerintahan Indonesia yang lebih baik perlu dilakukan secara bersama-sama.

KESIMPULAN

Dari penjabaran di atas, dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Pertama, peran Ulama yang mensejahterakan bangsa mulai bergulir dalam pemilu-pilpres yang kemudian mendorong para elite politik untuk menggunakan strategi pendekatan kepada para ulama maupun ormas Islam agar dapat membentuk citra “keagamaan”. Kedua, sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden RI, ulama yang bernama lengkap Prof. DR. Kyai Haji Ma'ruf Amin ini adalah Ketua Umum MUI dan Pengurus Besar Nadhatul Ulama (PBNU). Ketiga, pergeseran peran ulama ini kemudian naik satu tingkat ketika salah satu tokoh Islam Indonesia yakni KH. Ma'ruf Amin yang terlibat secara langsung dalam pemilu-pilpres 2019 lalu dengan dicalonkannya sebagai pasangan Joko Widodo. Adanya pernyataan KH. Ma'ruf Amin yang disampaikan kepada para santri di Indonesia selama pencalonan diri bahwa ulama juga dapat menjadi pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. M. (2020). *Peran Ulama Selaku Pewaris Nabi Dalam Kontestasi Pemilu-Pilpres Tahun 2019 Di Indonesia (Sebuah Kajian Living Hadis)*. 1–26. <https://doi.org/http://10.0.121.251/Osf.Io/R5chk>
- Azharghany, R., Adim, A., & Rusdi, H. R. (2022). Paradigma Dakwah Islam Dalam Kancah Politik Kekuasaan Pasca Kemerdekaan Di Indonesia. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*,

- Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin, *JSIPOL*, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023
21(2), 1–17. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v21i2.7184>
- Barata, M. F., & Simanjuntak, M. B. (2019). Strategi Publisitas & Propaganda Politik (Studi Pada Kandidat Presiden & Wakil Presiden, Jokowi-Kh. Ma'ruf Amin). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 23(2), 135–154.
- Bolong, B. (2018). Etika Politik Ulama. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 18(1), 129–152.
- Budiman, S. A., & Setyahadi, M. M. (2019). Peran Ormas Islam Dalam Menjaga Stabilitas Politik Sosial Budaya Indonesia Pasca Pemilu 2019 (Kajian Pustaka Pada Organisasi Islam Terbesar Nu Dan Muhammadiyah). *Jurnal Renaissance*, 4(02).
- Dāwud, A. (2018). *Sunan Abu Dāwud, Kitab As-Sunnah, Bab Fī Luzūmi As-Sunnati*. CD Al-Maktabah Al-Syāmilah, Global Islamic Software.
- Fadhil, R. (2022). Peran Tokoh Agama Dalam Membangun Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilu 2019. *Ilmiah Fisip*, 1.
- Fuadi, M. A., Adnan, M., & Utomo, S. (2014). Hubungan Tokoh Dan Politik Uang Terhadap Kontribusi Perbolehan Suara H. Amin, SH Pada Pilkada Kabupaten Ponorogo Tahun 2010. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip*, 1–73.
- Huda, M., & Dayat, M. (2019). POLITISASI ULAMA PADA PILPRES 2019 PERSPEKTIF KIAI SILO DI KABUPATEN PASURUAN. *Kabilah: Journal Of Social Community*, 4(1), 48–56.
- Istianaha, R., & Saehudin. (2023). POLITIK IDENTITAS DAN PERILAKU POLITIK KIAI DI KOTA SUKABUMI MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024. *ELECTORAL GOVERNANCE: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2), 233–250. Diambil Dari www.journal.kpu.go.id
- JURNAL PAGI. (2018). *Ma'ruf Amin Buktikan Santri Bisa Jadi Pemimpin*. Indonesia: Beritasatutv. Diambil Dari <https://www.youtube.com/watch?v=GyowsxhbeeQ>
- Khoiruddin, U. (2018). Urgensi Peran Elit Agama Dalam Panggung Politik (Analisis Kritis Peran Kiai-Kiai Kampung (Masjid) Terhadap Perpolitikan Praktis Di Kabupaten Kediri). *Prosiding Nasional*. Kediri.
- Kurniawan, B. (2018). Politisasi Agama Di Tahun Politik: Politik Pasca-Kebenaran Di Indonesia Dan Ancaman Bagi Demokrasi. *Jurnal Sosiologi Agama*, 12(1), 133–154. <https://doi.org/10.14421/jsa.2018/121-07.133-154>
- Lentera Islam. (2017). 3 Kriteria Pemimpin Dalam Islam, Ustadz DR Khalid Basalamah, MA. Diambil Dari www.youtube.com Website: <https://www.youtube.com/watch?v=Pmysawdj8bw&T=505s>
- Mahadi, U. (2015). KOMUNIKASI POLITIK KIAI PADA KAMPANYE PEMILU. *ADDIN*, 9(2), 229–252.
- Majah, I. (2018). *Sunan Ibnu Mājah, Kitab Al-Muqaddimah, Bab Ittibā'u Sunnati Al-Khulafā' I Ar-Rāsyidīna Al-Muhdīyina*. CD Al-Maktabah Al-Syāmilah, Global Islamic Software.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3 Ed.). USA: SAGE Publications Inc.
- Mujab, S., & Irfansyah, A. (2020). Komunikasi Politik Identitas K.H. Ma'ruf Amin Sebagai Strategi Depolarisasi Agama Pada Kontestasi Demokrasi Pilpres 2019. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 3(01), 54–66. <https://doi.org/10.25008/WARTAISKI.V3I01.46>
- Nasir, N. (2015). KYAI DAN ISLAM DALAM MEMPENGARUHI PERILAKU MEMILIH MASYARAKAT KOTA TASIKMALAYA. *Jurnal Politik Profetik*, 3(2). <https://doi.org/10.24252/profetik.v3i2a2>

- Nur Laili Nabilah Nazahah Najiyah, Siska Sukmawati, Hadis, *Gerakan & Politik Keagamaan : Menelaah Pergeseran Peran Ulama Dalam Pemilu Atas KH. Ma'ruf Amin*, JSIPOL, Vol.2 Issue.3 No.4, July 31, 2023
- Nasution, H. M. Y. (1988). *Islam Dan Problema-Problema Kemasyarakatan*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Nugroho, M., Priyowidodo, G., & Luik, J. E. (2020). Strategi Impression Management K.H. Ma'ruf Amin Saat Menjadi Wakil Presiden RI 2019 – 2024 Melalui Instagram @Kyai_Marufamin. *Jurnal E-Komunikasi*, 8(2), 153–170. <https://doi.org/10.1111/JCC4.12103>
- Putra, O. E. (2016). Ulama Sebagai Penyeimbang Kekuatan Sosial Politik Di Indonesia. *Jurnal Tarjih*, 13(1), 67–80.
- Qurtuby, S. Al. (2018). Sejarah Politik Politisasi Agama Dan Dampaknya Di Indonesia. *MAARIF*, 13(2).
- Rahmawanto, S. (2016). Peran Tokoh Agama Dalam Mewujudkan Keteraturan Masyarakat. *An-Nidzam*, 3(1), 117–134.
- Rasyid, S. A., Putra, R. S., & Arkin. (2023). *K.H. Ma'ruf Amin: Bapak Ekonomi Syariah Indonesia* (R. Ambiya, D. Yusuf, A. H. RD, & Khaidir, Ed.). Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Diambil Dari https://www.google.co.id/books/edition/KH_Ma_Ruf_Amin_Bapak_Ekonomi_Syariah_Ind/Blpbeaaaqbaj?hl=id&gbpv=1&dq=Rekam+Jejak+KH.+MA%27ruf+Amin&pg=PA115&printsec=frontcover
- Ronaldo, R., & Darmaiza. (2021). Politisasi Agama Dan Politik Kebencian Pada Pemilu Presiden Indonesia 2019. *Indonesian Journal Of Religion And Society*, 3(1), 33–48. <https://doi.org/10.36256/Ijrs.V3i1.150>
- Sahputra, D., & Ankesa, H. (2022). Komunikasi Politik Partai Politik Islam Menjelang Pemilu. *Tabayyun: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 3(1), 35–46.
- Setiawan, E. (2014). Keterlibatan Kiai Dalam Politik Praktis Dan Implikasinya Terhadap Masyarakat. *Ar-Risalah*, 13(1).
- Sonny. (2019a). Nilai Strategis Kefiguran Kh Ma'ruf Amin Sebagai Pasangan Joko Widodo Pada Pemilihan Presiden 2019. *Jurnal Renaissance*, 4(02), 541–550. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.3369585>
- Sonny. (2019b). Peta Politik Identitas Di Indonesia: Studi Terpilihnya K.H. Ma'ruf Amin Sebagai Bakal Cawapres Bakal Capres Inkumben Joko Widodo Pada Pilpres 2019. *Jurnal Renaissance*, 4(01'), 443–455. Diambil Dari <https://ejournal-academia.org/index.php/renaissance/article/view/88>
- Tirmidzi. (2018). *Sunan At-Tirmidzi, Kitab Mā Jā`A Fī Al-`Akhdzī Bi As-Sunnati Wa Ijtinābi Al-Bid'i*. Cd Al-Maktabah Al-Syāmilah, Global Islamic Software.
- Ulum, A. R. S. (2018). *Kiai Ma'ruf Amin: Menyelami Jejak Pemikiran Sang Politisi, Pemikir, Dan Ulama Besar*. Anak Hebat Indonesia. Diambil Dari https://books.google.co.id/books?id=Fkveeaaaqbaj&newbks=0&printsec=frontcover&pg=pa1&dq=Rekam+Jejak+Kh.+Ma%27ruf+Amin&hl=id&source=newbks_fb&redir_esc=y#v=onepage&q=Rekam+Jejak+Kh.+Ma'ruf+Amin&f=false
- Umar, S. U. (2020). *Ulama Dan Politik (Study Peran Ulama Dalam Kontestasi Politik Di Kabupaten Polewali Mandar)*. Uin Alauddin Makassar.
- Yusalia, H. (2011). Ulama Dan Politik: Tinjauan Peran Abdurrahman Wahid Dalam Perpolitikan Indonesia. *Wardah*, Xxii(22).
- Zulhendra, J. (2022). Pemilu (Pemilihan Umum) Dalam Kajian Politik Islam. *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 17–26.